



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAYAR
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 908867

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/134 m2 di KAB / KOTA MALANG, Rp. 250.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/190 m2 di KAB / KOTA MALANG, Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	55.000.000
1. MOBIL, TOYOTA VIOS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	14.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	491.507
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	570.191.507
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	570.191.507

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DICKY MOHAMMAD DIKMAN
2. Jabatan : KEPALA LOKA
3. NHK : 888490

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.060.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m²/72 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/72 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 512 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m²/45 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m²/72 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
6. Tanah Seluas 166 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1385 m²/165 m² di KAB / KOTA KEDIRI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 274 m²/100 m² di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
9. Tanah Seluas 61 m² di KAB / KOTA PROBOLINGGO, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 600.000.000



1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT SPORT UTILITY VEHICLE

Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	39.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	45.432.885
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.744.432.885
III. HUTANG	Rp.	99.044.526
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.645.388.359

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIRIN KARYAWATI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELOUARAN
3. NHK : 169448

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	150.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m ² /90 m ² di KAB / KOTA PASURUAN, WARISAN	Rp. 150.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	---
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.344.184
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	155.344.184
III. HUTANG	Rp.	50.632.800
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	104.711.384

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS MIANTO
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 251324

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	500.000.000
1. Tanah Seluas 1712 m ² di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1310 m ² /32 m ² di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m ² /71.5 m ² di NEGARA [unknown], HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	8.500.000
1. MOTOR, HONDA PRIMA SEPEDA MOTOR Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
2. MOTOR, YAMAHA VEGA R SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	879.325
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	509.379.325
III. HUTANG	Rp.	6.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	502.879.325

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDREAS WIDYO KRISTANTYO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 626846

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.157.400.000
1. Tanah Seluas 107 m ² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 149.800.000		
2. Tanah Seluas 269 m ² di KAB / KOTA MALANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 107.600.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m ² /100 m ² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 900.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	228.000.000
1. MOTOR, YAMAHA LEXI S Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2020, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 200.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA FREEGO S Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.397.700.000
III. HUTANG	Rp.	268.130.948
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.129.569.052



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : MUHAMMAD NUR ZHOFIR
- Jabatan : BENDAHARA PENERIMA
- NHK : 1016051

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	345.517.811
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	350.017.811
III. HUTANG	Rp.	347.608.624
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.409.187

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnp.kpk.go.id](#). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnp.kpk.go.id](#), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.